

**AWAL TERJADINYA KORUPSI
(STUDI KASUS KORUPSI OLEH PENYELEGGARA NEGARA)**

**Oleh : Isnawati
Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

=====

ABSTRACT

This research is a library research by local newspaper namely Tribun Kaltim dan Kaltimpost .It was held in 2014 .The focus is about corruption in Banten , Sangatta and Jakarta. The corruption in Banten is about the dynasti of Atut , The corruption in Sangatta is the state officers and the corruption in Jakarta is the head of the Democrat political party.The method of the research is to select the corruption news published by the newspaper concerned.The result of it is that the corruption can be happened because of three conditions namely : opportunity , willing and power.In Banten Ratu Atut as a governor,in Sangatta as state – officers of the regency and Anas Urbaningrum as the chairman of the Democrat Political Party have those three reason mentioned above.The suggestions of the resarcher to avoid of the corruption criminal action are to keep the opportunity , willing and power in honest ways .It means a man cannot use those three reasons to be out of control.

Keywords : corruption ,dynasty , oportunity , power and willing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia ini panggung sandiwara dan juga seperti panggung pewayangan . Kata Ki Dalang bahwa bahwa lingkungan dalam wayang ada tiga yaitu lingkungan alam , lingkungan sosial dan lingkungan budaya.Lingkungan alam di pedalangan digambarkan sebuah gunung atau kayon yang menggambarkan makrokosmos .Kayon berasal dari Bahasa Arab Khayyu yang berarti hidup. Kayon itu melambangkan bentuk kehidupan yang terdapat di jagad raya atau dunia yang mengalami tiga tahap atau tingkatan yakni pepohonan terdapat dalam gunung dan sebagaimana orang mengartikan sebagai pohon kalpataru yang mempunyai makna pohon kehidupan. Dalam kayon terdapat gambar binatang dan bermacam-macam unggas merupakan gambaran dari berbagai macam tingkatan kehidupan di dunia, sedangkan gambar ular yang melilit pada pohon merupakan badan jasmani dan rohani yang menyatu dan dalam seni pedalangan disebut kayu mati rinambatan hardawalika. Orang hidup itu digambarkan sebagai wayang yaitu purwa, madya dan purna. Purwa artinya mulai maka orang mulai hidup sejak dikandung, dalam wayang purwa atau wayang kulit

maka dimulai dengan mengangkat kayon dari gedebog. Gedebog yaitu pohon pisang yang dipasang memanjang untuk menancapkan wayang sebagai lambang dunia kehidupan. Selanjutnya setelah anak lahir maka ia akan bergaul atau bersosialisasi dengan masyarakat yang disebut madya artinya ia sedang mengarungi hidup dimana ia akan mengalami suka dan duka. Akhir dari hidup adalah mati, artinya sudah purna maka apabila masih hidup dan dikaruniai Tuhan suatu kenikmatan berupa derajat, pangkat, kekayaan, ketenaran, kegagahan, kecantikan, kekuatan dan kepandaian yang melebihi orang lain janganlah takabur. Hidup di dunia ini hanya sebentar sepertinya orang hidup di dunia ini hanya mampir ngombe . Orang hiduppun dalam pewayangan dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama ditandai dengan nada enam atau patet enam atau lasem atau enam. Pada tahap ini dimulai dengan adegan kerajaan atau sebuah keluarga atau Kahyangan Junggring Salaka. Di sanalah awal pembahasan masalah yang akan dipentaskan. Waktu patet lasem ini dari pukul 09.00 malam sampai dengan pukul 12.00 malam. Patet ini menggambarkan kehidupan manusia yang mulai bangkit . Setelah patet lasem lalu diteruskan dengan Patet sanga itu disebut Lima. Arti lima adalah akhir suatu musik gamelan adalah pada nada ke lima, di sini ada dengan gara-gara yaitu pergolakan hidup dengan bergulat dengan kenyataan hidup yang dilambangka sebagai lautan berombak tinggi, angin kencang, pohon tumbang, gunung meletus dan neraka mendidih. Peristiwa ini menjadi reda dengan munculnya punakawan artinya kedamaian. Setelah gara - gara muncul kesenangan dengan bernyanyi ria. Di patet sanga ini terjadi suatu keheningan di adegan pertapan atau padepokan. Kedamaian di tahap ini diganggu oleh serbuan raksasa dari musuh untuk menghancurkan para satria. Ini melambangkan bahwa yang baik pasti diganggu oleh yang jahat. Pada tahap akhir disebut wusana ditandai dengan patet manyura. Di sini digambarkan bahwa semuanya telah berakhir yang benar akan menang dan yang jahat akan kalah.Becik ketitik ala ketara. Wayang sebagai simbol dalam diri manusia yang mengarungi kehidupan dalam suka dan duka yang digambarkan dalam pementasan wayang kulit semalam suntuk.Di sini juga ditandai dengan berakhirnya kekuasaan , kenikmatan dan keagungan dengan pensiun atau habis masa jabatan atau turun tahta atau mati.

Orang hidup itu harus hati-hati dalam sikap, bicara dan bergaul. Kalau orang itu hati-hati maka ia akan dijauhkan dari bahaya. Jangan sampai membuat orang sakit hati , kalau kita disenangi orang adalah suatu anugerah.Di dunia ini bila lagi mujur maka rumputpun membantu tetapi sebaliknya kalau lagi sial ngomong saja disumpahi orang. Maknanya bahwa rumput yang letaknya di bawah yang diijak manusia maupun hewan rumput diumpamakan sebagai orang kebanyakan yaitu orang-orang kecil . Orang itu kalau sedang mujur siapa saja membantu (menjadi

teman) termasuk orang kebanyakan yaitu orang-orang kecil yang digambarkan rumput. Seperti para pejabat seperti Ratu Atut di Banten, pegawai negeri di Sangatta dan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum partai bahwa mereka sejak awal atau purwa berjuang sekian tahun dengan segala kesulitan yang dihadapinya. Tuhan memberi kesuksesan kepada mereka sehingga mereka berjaya di bidangnya masing-masing. Mereka sedang berjaya di alam yang disebut madya namun mereka lupa bahwa kenikmatan dan sejenisnya itu akan purna pada suatu saat. Kalau sedang enak lupa akan intinya hidup. Seperti pelwak Bagio almarhum kalau sudah duduk lupa berdiri. Mereka tidak dapat mengendalikan kesempatan, keinginan dan kekuasaan sehingga terjerumus ke lembah duka yang salah satunya menjadi pesakitan "koruptor". Kemudian mereka menjadi orang celaka atau tidak mujur sehingga ngomong aja disumpahi orang artinya serba salah dan tidak ada yang mendukung. Hal yang mereka lupa bahwa mereka lupa berkomunikasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders. Supaya cita-cita kita terwujud harus mempunyai komunikasi yang baik kepada atasan yang disebut vertikal dan kepada sesama yang disebut horisontal dan kepada bawahan yang disebut akar rumput.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah para pejabat khilaf tidak berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan sehingga melakukan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah para pejabat khilaf mengendalikan kesempatan, keinginan dan kekuasaan dengan berkomunikasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi?

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada para pejabat untuk mengendalikan kesempatan, keinginan dan kekuasaan dengan berkomunikasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

KERANGKA DASAR TEORI

Untuk memperkuat penelitian peneliti mengemukakan beberapa teori sebagai berikut :

A. Komunikasi sebagai independen variabel

Menurut George C. Edwards (1975 : 445–488) mengungkapkan salah satu keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh komunikasi. Perubahan kehidupan masyarakat dalam pembangunan cenderung mengarah kepada implikasi nilai tentu akan mengundang pemikiran para ahli komunikasi yang kreatif dan intensif menelaah dampak-dampak komunikasi yang efektif untuk mewujudkan kualitas informasi dan publikasi yang menunjang kebijakan pengambil keputusan untuk mengatur mekanisme pembangunan. Secara definitif komunikasi sebagai setiap proses dimana alasan-alasan keputusan diteruskan dari satu anggota organisasi kepada anggota lainnya. Komunikasi merupakan urat nadi organisasi, tanpa komunikasi tidak akan terdapat pengorganisasian karena bila demikian tidaklah mungkin kelompok itu mempengaruhi perilaku individu yang ada dalam organisasi tersebut. Menurut Van Meter (1975) orang hidup itu pasti dibantu orang lain artinya komunikasi antar organisasi untuk penguatan aktivitas. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak lain. Dalam teori dinyatakan bahwa komunikasi merupakan sumber kehidupan organisasi (Sharma, 1982 : 239) yang secara tegas dinyatakan komunikasi merupakan darah organisasi. Dalam hal ini Rogers (1976 : 7) mendukung pendapat tersebut dengan menyatakan komunikasi adalah darah kehidupan organisasi, jika kita menghentikan komunikasi dalam organisasi berarti kita tidak akan memiliki organisasi. Davis (1977 : 37) berpendapat bahwa kebutuhan komunikasi bagi organisasi sama dengan aliran darah bagi manusia. Sebagaimana manusia menghasilkan penyempitan pembuluh nadi, suatu pembekuan nadi yang mengganggu efisiensi mereka, begitu juga organisasi menghasilkan *infosclerosis* suatu pembekuan informasi yang menghasilkan ketidakefisienan yang sama.

Komunikasi di dalam organisasi dan antara orang perorang merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam mengirimkan pesan ke staf dalam organisasi atau dari orang perorang yang satu dengan yang lain, para penyampai pesan (*communicator*) tidak boleh melakukan distorsi baik secara kelembagaan maupun diluar kelembagaan. Para ahli menyatakan bahwa komunikasi memiliki beberapa unsur penting, James A. F. Stoner (1982 : 496) mengatakan bahwa unsur-unsur komunikasi adalah merupakan bagian dari suatu kebulatan yang lebih besar. Menurutnya unsur-unsur komunikasi adalah sumber, pembuat sandi, warta, saluran, penerima, penafsiran sandi, arti, umpan balik dan gangguan. Menurut Koontz et al.(1982) menyatakan bahwa akibat komunikasi

tergantung dari gangguan, umpan balik dalam komunikasi dan faktor-faktor situasi dan organisasi dalam komunikasi serta unsur-unsur komunikasi yang terdiri dari pengirim warta, penerima warta, perubahan” Kai Ipul berujar ahli lain yaitu Baron (1986 :304) mengatakan “Unsur-unsur yang sederhana dari Komunikasi yaitu : Pengirim, penerima dan umpan balik.” Lanjut Kai Ipul bahwa komunikasi amat vital karena terdapat unsure – unsur : (1). Sumber komunikasi yang dapat disebut juga pembuat sandi, pengirim pesan, pengirim warta dan komunikator yaitu pihak yang memiliki warta yang ingin disampaikan kepada pihak lain. (2).Warta adalah suatu pengertian yang akan disampaikan oleh pengirim warta. Bahan untuk membuat warta antara lain huruf, angka, garis, tanda baca, warna, cahaya gerak simbol bunyi dan kode. (3). Saluran adalah alat untuk menyampaikan warta dari sumber warta kepada penerima warta. Warta lisan disampaikan melalui udara, warta tertulis disampaikan melalui warkat dan warta rekaman melalui kaset, flash-disk dan alat komputer lainnya. (4). Penerima warta adalah pihak yang memperoleh warta dari pengirim warta. Penerima warta dilakukan oleh seorang atau kelompok. (5). Hasil adalah perubahan penerima warta setelah menerima warta yang selanjutnya penerima warta mengalami perubahan perilaku. (6). Umpan balik adalah tanggapan atau reaksi dari penerima warta kepada pengirim warta yang selanjutnya terjadi komunikasi timbal-balik. Syarat yang harus dipenuhi sebagai pelaksana komunikasi yang ditetapkan oleh Ripley et al. (1973 : 10), adanya pola, norma yang baik dalam diri pelaksana komunikasi yang secara jelas kriterianya adalah tingkat komunikasi terbuka (yaitu jaringan komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas dan tingkat kebebasan komunikasi yang tinggi dengan orang-orang di luar organisasi). Sementara itu, proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan (*messages*) dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan dalam proses tersebut bertujuan (*feed-back*) untuk mencapai saling pengertian (*mutual understanding*), (Ruslan, 1982 : 69). Jadi kesimpulannya apa agar dibantu dan didukung oleh orang banyak atau dengan kata lain suket godong dadi rewang ? Semua terpulang kepada komunikasi bila komunikasi lancar maka target akan tercapai .Dua hal penting dalam komunikasi adalah telinga dan mulut.. Ada pepatah mulutmu hariamaumu artinya bahwa bila kita bicara dengan baik yaitu apa yang dikatakan orang seseorang apapunderajatnya maka harus direalisasikan dalam perbuatan.Kalau bicara sopan maka orang akan menghormati bila bicara kasar orang akan mencemoohkan pandai-pandailah kita berbicara supaya jelas maksudnya Telinga untuk mendengarkan pandai-pandailah kita mendengarkan agar kita cakap menangkap pembicaraan .Apabila orang diperdengarkan hal-hal yang baik sejak kecil maka

ia bertindak yang baik pula. Bisikilah anak-anak balita dengan kata-kata bijak, firman Allah dan lagu-lagu yang mendidik.

B. Korupsi sebagai dependen variabel

Korupsi sebagai suatu tindak pidana dalam konteks hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penegsaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Salah satu tindak pidana adalah korupsi yaitu mengambil harta kekayaan yang bukan haknya dengan segala cara yang diduga tidak wajar yang melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang – undang pemberantasan korupsi dan pasal tambahan, “diduga melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 pasal 11 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi disebabkan kekuasaan atau power. Kekuasaan dapat berupa jabatan/pangkat, kesempatan dan keinginan untuk melakukan korupsi sehingga *power tends to corrupt*.

Ditinjau dari etimologis bahwa korupsi dari bahasa Inggris *corruption which means the action of corrupting* dan dalam bahasa Indonesia korupsi disebut penyelewengan. Bentuk korupsi adalah pencucian uang sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 dan / atau pasal 6 ayat 1 Undang-undang perubahan pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 3 ayat 1 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;
- b. Menstransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;
- c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

- d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- f. Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;
- g. Menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau
- h. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Pasal 6 ayat 1 Undang-undang perubahan pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi :

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai : a) penempatan; b) pentransferan; c) pembayaran; d) hibah; e) sumbangan; f) penitipan; g) penukaran. Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Mantan Ketua Partai Demokrat

Dua hari setelah sempat bersitegang dengan petugas keamanan rumah tahanan KPK di Guntur, keluarga Anas Urbaningrum akhirnya bisa membesuk. Adik Anas, Anna Luthfie kembali membawa ransum yang selama ini ditolak KPK, yakni pakaian, buku dan Alquran, serta makanan. Dia menyebut selama di tahan Anas banyak menulis dan tirakat.

Usai menjenguk, Luthfie menyatakan keadaan kakaknya baik-baik saja. Soal makanan yang selama ini disarankan agar tidak dikonsumsi, tampaknya dituruti Anas. Dia menyebut saat ditemui, Anas mengaku tidak makan makanan KPK, Anas tersangka kasus korupsi proyek Hambalang tirakat di sana.

Lantaran Anas bakalan menolak makanan KPK, kemarin dia membawa banyak pasokan terutama, makanan ringan serta roti tawar yang bisa dikonsumsi untuk sarapan. Untuk buku, Luthfie membawa bacaan berjudul Merdeka seratus Persen dan Heroes karya Tan Malaka.

Untuk judul terakhir, di sebutnya bukan permintaan Anas. Tetapi ini sifatnya untuk membakar semangat Anas didalam penjara, Dia menyebut buku itu cocok untuk kakaknya yang sedang memperjuangkan kebenaran . Soal kegiatan Anas selama ini, dia menyebut kakaknya banyak menulis dan mendekat diri pada Tuhan. Dia melihat Anas menulis tentang kuliner. Belum tentu pasti tulisan itu nanti menjadi buku atau hanya pelampiasan rasa sepi. Yang pasti, belum ada tulisan soal politik sementara ini.

Saat ditanya kapan Athiyah Laila istri Anas menjenguk, dia menjawab kemungkinan datang pada hari ini. Memang, jam besuk pada Senin dan Kamis bisa bertambah. Biasanya, waktu tambahan itu diberikan saat ada hari libur nasional. Iparnya tidak bisa ikut menjenguk karna masih dirumah orangtuanya

Tidak hanya keluarga, loyalis Anas, Tri Dianto, Saan Mustopa, Umar Arshal dan anggota perhimpunan pergerakan Indonesia (PPI) juga datang untuk menjenguk namun, keduanya tidak di izinkan untuk masuk karna saat ini hanya keluarga yang boleh bertemu Anas.

Sama seperti Luthfi, kedua orang tersebut juga membawa beberapa keperluan termasuk makanan. Namun, seperti itu harus dibawa kembali karena tidak diterima oleh petugas keamanan KPK.

Lantaran tidak diizinkan masuk, Saan memilih untuk menitipkan salam pada Anas melalui keluarga yang datang. Rencananya, kalau datang lagi dia akan membawa makanan kesukaan Anas. Saan juga mengaku tidak bisa mendampingi Anas saat ditahan pada Jumaat (10/1) karena ada di luar kota .

Sementara mantan ketua DPC Partai DEMOKRAT Cilacap, Tri Dianto bertekad untuk datang lagi rencananya, dia kembali ke KPK pada Kamis saat jam besuk dibuka lagi

Pada bagian lain entah sebagai *counter* terhadap penahanan Anas atau mempunyai maksud lain, puluhan pengunjukrasa berasal dari Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Anti korupsi kemarin mendatangi KPK mereka membawa kerangka kayu yang dibalut dengan kain menyerupai bentuk pil benda berukuran jumbo di beri nama "pil kuat" itu di serahkan ke KPK pil raksasa berwarna hijau dan hitam identi dengan warna bendera HMI itu bertuliskan "Pil kuat.Anti intervensi islam untuk KPK. Tangkap Edhie Baskoro Yudhoyono "

Seseorang orator menyampaikan obat kuat itu diberikan agar KPK tegas termasuk pada lingkaran istana. Sebab selama ini sejumlah nama keluarga SBY disebut dalam kasus korupsi namun belum ada yang di periksa .

Seperti diketahui Anas merupakan ketua HMI sebelum dia terpilih sebagai ketua umum partai demokrat tidak hanya kerabat Anas mantan Dubes Indonesia Amerika Serikat, Dino Patti Jalal juga datang ke KPK.

Dalam perkembangan pemeriksaan KPK kemarin juga kembali memeriksa tersangka Hambalang yang lain, Machfud Suroso. Direktur PT.Dutasari Citralaras dari proyek Hambalang itu mengaku siapa melakukan pembuktian terbalik atas tuduhan korupsi yang di alamatkan padanya.

Pencegahan Machfud Suroso, Syaipul Ahmad Dinar mengungkapkan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perolehan PT Dutasari Chitralas dari Proyek Hambalang. Syaipul mengatakan dalam proses hambalang sebenarnya kliennya malah rugi. Sebab biaya yang sudah dikeluarkan lebih besar dari yang di dapat dari Hambalang."Akibatnya klien kami rugi hingga 40 miliar lebih. Hitung-hitungannya itu semua ada, makanya kami siap melakukan pembuktian terbalik dipersidangan nanti" paparnya.

Pada tataran pengelolaan proyek Hambalang peneliti menemukan adanya :

(1) Anas Urbningrum memiliki banyak sekali kesempatan untuk menyeleweng sewaktu menjadi anggota DPR RI dan Ketua Partai Demokrat. (2) Dia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi Presiden RI sehingga ia mencari dana untuk mengegolkan ambisinya. (3) Sebagai Ketua partai ia memiliki kekuasaan untuk menguasai Ketua DPD Partai Demokrat di daerah untuk dimanfaatkan. Namun ia tidak inten berkomunikasi sehingga kekeliruan terjadi , kesempatan penyeleweng tak terdeteksi dan administrasi semrawut.Betapa pentingnya komunikasi sehingga dapat membuat celaka para pelaksana yang masuk ke ranah hukum.

B. Kasus Korupsi di Sangatta

Tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, di 2014 ini Polres Kutim kembali mendapat dukungan penuh dari Mabes polri untuk mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi. Dimana dalam penanganannya setiap kasus, Unit Tipikor Satreskrim diberikan anggaran sebesar Rp 208 juta.

"Kalau saya lihat di Dipa Polri, penanganan satu kasus korupsi mendapat anggaran Rp 208 juta. Untuk tahun depan diberi batas maksimal anggaran untuk menangani 2 perkara korupsi," kata Kapolres kutim AKBP Edgar Diponogoro.

Mantan penyidik KPK kini mengakui untuk 2014 dirinya tidak memasang target pengungkapan kasus korupsi. Sebab, dalam kasus korupsi tidak boleh menarget seseorang sebagai tersangka. Namun sebagai mana caranya bisa menemukan, apakah seseorang itu terlibat tindakan korupsi atau tidak. Jika memang ditemukan, maka akan langsung diselidiki sampai tuntas. Begitu juga sebaliknya.”saya belum bisa ungkapkan berapa yang akan naik penyidikan tahun ini. Tapi setidaknya-tidaknya ada 2 kasus yang akan di garap sesuai DIPA anggaran yang di berikan Polri. Beberapa informasi sudah dihimpun . mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera digarap,” paparnya.

Meskipun begitu, Kapolres mengakui, Dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi, pihaknya tidak hanya mengejar tersangka saja, namun bagai mana juga melakukan recovery (pengembalian) aset yang merugikan Negara. Itu sebabnya, Polres juga akan coba menerapkan Undang –undang tentang pencucian uang (money laundering) terhadap tersangka kasus dugaan korupsi.

“Jadi akan kami coba menerapkan Undang –undang pencucian uang bagi tersangka korupsi sebab dengan cara ini aset tersangka korupsi bisa disita untuk dikembalikan ke Negara,”kata Edgar.

Sementara itu, Kanit Tipikor Reserse Polres Kutim Ipda Slamet menerangkan, pada tahun 2013 ada 2 kasus yang telah di limpahkan ke Kejaksaan. Yakni, kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Majelis Taklim Danau Melintang, yang sudah dalam tahap P21(lengkap).Sementara, Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial aspirasi DPRD Kutim dengan tersangka Ahmad Sutrisno (AS), masih dilengkapi. “Untuk kasus AS, berkasnya masih kami lengkapi sesuai arahan kejaksaan. Nanti kalau sudah selesai, akan kami informasikan”,kata Slamet.

Meskipun tak pasang target, namun Polres Kutai Timur kini mulai disibukkan dengan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya indikasi penyelewengan keuangan Negara. Bahkan jumlahnya ada tiga laporan masyarakat yang sudah diterima.

Kapolres Kutai Timur AKBP Edgar Diponegoro mengatakan, beberapa dugaan penyelewengan dana Negara tersebut adalah dana bantuan sewa rumah mahasiswa Kutai Timur bernilai miliaran rupiah, termasuk proyek aspirasi DPRD Kutai Timur dan pembebasan lahan maloy.

“Kami tidak punya target, tapi saat ini anggota sedang mendalami tiga laporan masyarakat. Pertama adalah laporan terkait sewa rumah kos bagi anak mahasiswa Kutai Timur dan ada juga proyek aspirasi dan pembebasan lahan,” kata Edgar.

Dia menerangkan, kusus untuk sewa rumah, anggotanya sudah memanggil cukup banyak orang yang di anggap mengetahui sumber dana, dan penggunaan dana, untuk dimintai keterangan. Termasuk pejabat dan pengurus himpunan mahasiswa juga diperiksa.

“Untuk laporan ini, sudah cukup banyak yang kami panggil untuk dimintai keterangan. Bahkan dalam waktu dekat, laporan ini akan diekspos untuk diuji apakah memenuhi syarat untuk dinaikan kepenyidikan atau tidak. Tapi kasus ini masih penyelidikan. Sama dengan lainnya, semua masih dalam penyelidikan,” jelasnya. Meskipun masih dalam penyelidikan, namun mantan penyidikan KPK ini, mengisyaratkan tahun ini mampu menaikan kasus kepenyidikan sebanyak dua kasus. Hanya belum tentu dari kasus yang sedang digarap saat ini.

“Karna masih penyidikam, kami belum bisa simpulkan apakah memenuhi syarat untuk dinaikan kepenyidikan atau tidak. Yang jelas, kami punya anggaran untuk menyidikan dua kasus. Itu minimal, bisa lebih kalau memang ada yang bisa disidik,” papar Edgar.

Sekedar di ketahui, khusus untuk laporan dana hibah sewa rumah, pertama kali terungkap dari mahasiswa yang melakukan demo ke Kejari dan ke Polres Kutai Timur beberapa bulan lalu. Konon, himpunan mahasiswa Kutai Timur (Hikma KT), mendapat anggaran rumah tahun lalu. Namun sewa rumah tersebut diduga tidak sampai pada sasaran. Bahkan banyak sewa rumah yang belum terbayar, sehingga mahasiswa penghuninya nyaris diusir pemilik rumah.

Para tersangka kasus korupsi bantuan sosial, bantuan sewa rumah untuk mahasiswa dan aspirasi DPRD Kutai Timur adalah masalah peka. Seyogyanya pengurus majelis taklim harus (1).Memanfaatkan kesempatan menerima bansos dengan baik sehingga tidak dicurigai orang lain. Mereka seharusnya mengerem keinginan pribadi karena uang dari bansos tersebut adalah uang pengurus yang harus dipertanggungjawabkan kelak kemudian hari. (2). Mereka seharusnya jangan memanfaatkan kekuasaan sebagai pengurus karena diberi amanah untuk kemajuan majelis taklim. (3). Kemudian mereka harus berkomunikasi dengan pemerintah/pejabat daerah, pengurus dan stakeholder lainnya serta masyarakat sekitarnya. Bila berkomunikasi secara vertikal dan horisontal maka semua jelas sehingga tidak timbul pertanyaan. Timbulnya pertanyaan akan berujung kepada ranah hukum. Ia lupa bahwa bantuan sosial harus ada laporan yang benar sejak awal menerima, penggunaan pada pembelanjaan di ranah madya dan pelaporan secara jujur pada purna kegiatan.

Kasus ke dua adalah dana aspirasi DPRD Kutai Timur bahwa (1). Dana itu untuk sebesar-besarnya sesuai aturan yang berlaku namun karena ada kesempatan maka dana itu dipakai menyimpang dari peruntukannya. sehingga pemegang dana tersebut (2). Para pemegang dana aspirasi berkeinginan yang tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukannya sehingga mereka melanggar hukum. (3). Mereka memiliki kekuasaan untuk mengelola dana aspirasi sehingga mereka lupa bahwa dana itu diatur oleh undang-undang.

B. Kasus Korupsi di Banten

Kasus yang menjerat Gubernur Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaerin Wardhana alias Wawan bisa membuat dinasti Atut roboh, apalagi, kemarin (13/1) KPK mengumumkan ada tambahan pasal yang dikenakan pada keduanya. Wawan bisa miskin karena dijerat pencucian uang, sementara pasal berlapis terus dikenakan pada Atut.

Jubir KPK Johan Budi SP saat mengumumkan kemarin sore merinci, untuk Wawan telah ditemukan cukup bukti untuk dikenakan ke tidak pidana pencucian uang. Oleh KPK, dia juga melanggar pasal 3 dan/ atau pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Disamping itu, dia juga diduga melanggar pasal 3 ayat 1 dan / atau pasal 6 ayat 1 Undang-undang perubahan pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Diterapkannya pasal-pasal itu membuat Wawan harus siap membuktikan harta miliknya bukan dari tindak pidana korupsi. "Penelusuran aset sudah dilakukan KPK sejak menjadi tersangka," ujar Johan.

Namun, dia belum tahu pasti apakah penerapan pasal itu sudah di ikuti dengan penyitaan. Seperti diketahui, selama ini penerapan pasal pencucian uang oleh KPK identik dengan penyitaan juga.

Saat disinggung apakah itu termasuk mobil-mobil mewah milik Wawan yang terancam disita. Johan menyebut bisa saja. Sebab aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tidak satu buah saja. Dia akan berjanji akan menyampaikan berita terbaru setelah bertanya pada penyidik kasus Wawan "Asetnya tentu tidak hanya satu. Saya cek dulu apakah sudah ada penyitaan atau belum ada," tuturnya.

Johan mengakui, penerapan pasal itu punya jeda waktu dengan penangkapan. Namun, dia tidak khawatir dengan adanya aset yang sudah dipindah tangan kan oleh wawan. "Sepanjang aset belum disita, memang bisa dijual belikan. Tapi nanti ada datanya," katanya

Dia tidak mau berandai-andaian adanya tanah, rumah atau mobil milik Wawan yang sudah ada yang dijual atau belum. Johan lebih memilih mengecek pada penyidik terlebih dahulu sebelum member pertanyaan.

Sementara ini, lanjutnya, penerapan pasal pencucian uang masih dikenakan pada Wawan. Untuk orang terdekatnya seperti istri, Airin Rachmi Diany, belum ada indikasi soal kemungkinan perempuan yang juga wali kota Tangerang Selatan dijerat pencucian uang, Johan menyebut bisa saja, "Sepanjang penyidik menemukan barang bukti, bisa saja penyidik menyimpulkan keterlibatan orang lain," jelasnya.

Sedangkan untuk Ratu Atut, dia menyebut penyidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi baru, selain melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU pembrantasan korupsi di kasus pengadaan alat kesehatan (alkes), dan dan pasal tambahan, “diduga melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 pasal 11 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” urainya.

Pada pasal 12 huruf e UU pembrantasan tindak pidana korupsi mengatur dugaan dugaan pemerasan. Berarti, Atut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Pasal itu menyebut adanya paksaan kepada seseorang untuk memberikan, atau membayar sesuatu untuk dirinya.

Kalau KPK bisa memiskinkan Wawan, Atut harus bersiap menua di penjara. Sebab, pasal berlapis yang dikenakan pada dirinya bisa membuat istri almarhum Hikmat Tomet itu penjara hingga 20 (dua puluh) tahun. Meski Indonesia tidak menerapkan hukum akumulatif, penerapan pasal berlapis bisa membuat Atut dihukum maksimal.

Bagaimana peluang Atut kena pasal pencucian uang? Johan menyebut masih terbuka. Saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dengan meminta laporan transaksi pada PPAATK. “Tergantung dari penyidik, apakah menemukan bukti permulaan. Tapi, sampai hari ini belum ada,” ucapnya.

Terpisah, kuasa hukum Atut Firman Wijaya heran dengan langkah KPK yang dengan mudah menerapkan pasal baru. Apalagi, hingga saat ini kliennya belum banyak diperiksa. Sehingga, tidak bisa menjawab atau menerangkan apa saja yang dituduhkan KPK. “Belum pernah diperiksa terkait tuduhan penerimaan dan Gratifikasi. Masih sengketa pilkada. Bagi saya, sangkaan ini menunjukkan kalau penyidik KPK belum punya arah yang jelas dalam proses penyidikan. Ini sebuah akumulasi tuduhan untuk Bu Atut,” tegasnya.

Atut sangat berkuasa karena dinastinya hampir semua menjabat di berbagai jabatan di Banten maupun di luar Banten sehingga : (1). Ia seolah sangat kuat sehingga ia kurang komunikasi dengan bawahan, teman, staf dan rakyat. Ia terlena karena kesempatan yang luas dan masif. (2). Ia terlena karena memiliki keinginan yang tak dapat dikontrol oleh publik karena publik sudah ia kuasai. (3). Ia terlena karena kekuasaan yang besar sehingga lupa berkomunikasi dengan orang lain seperti ke anggota DPRD, staf pemerintah daerah dan rakyat sebagai pemilih. Buktinya begitu ia ditangkap oleh KPK masyarakat lega dengan menggundul kepala, selamat dan pesta kemenangan. Jika ia banyak komunikasi ia akan ada yang mengingatkan, ada yang memberi input serta pandangan tentang langkahnya. Ia lupa bahwa kekuasaan ada batasnya. Ia lupa tentang purwa,

madya dan purna. Ia lupa bahwa komunikasi adalah darah dari kepemimpinannya dalam organisasi yang disebut provinsi Kalimantan Timur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati kejadian tindak pidana korupsi maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan kurang dikomunikasi baik vertikal dan horisontal
2. Sesuatu keputusan yang berdampak luas tidak dibawa dalam rapat baik terbatas, elit dan pleno.
3. Menejemen kurang mengendalikan agar dapat membatasi kesempatan, keinginan dan kekuasaan

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian ini peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Memanfaatkan ilmu komunikasi untuk menghasilkan relasi yang efektif .
2. Pejabat harus dibatasi dan diberi SOP dalam hal kesempatan korupsi , keinginan meyeleweng dan kekuasaan yang berlebihan melalui pengawasan.
3. Adanya *rewards* dan *punishment* bagi ara staakholders.

DAFTAR PUSTAKA

- Amijojo, Projo ,1995,Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia jilid 1, PT. Pradnya Paramit , Jakarta.
- Peradilan, Majalah HukumTahun XVII No.203 ,Agustus 2003, Jakarta
- Surat Kabar Harian Kaltimpos, 2014, Samarinda
- Surat Kabar Harian Tribun Kaltim, 2014. Samarinda
- Undang-undang perubahan pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pasal 6 ayat 1.
- Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Pencucian uang Pasal 3 ayat 1